
Sekolah Raja (*Hoofdenschool*) sebagai Sekolah Pangreh Praja 1865-1900

Septian Teguh Wijiyanto ^{a, 1 *}

^aJurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

¹septianteguhw@uny.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Pemerintahan Belanda di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari peran dan pengaruh kaum priayi dalam hal ini pangreh praja. Para pangreh praja atau sering disebut *Inlands Bestuur* dalam sistem pemerintahan mereka sengaja dibentuk demi kepentingan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui latar belakang berdirinya Sekolah Raja, 2) perkembangan Sekolah Raja tahun 1865 sampai dengan 1900 sebagai alat pendidikan Belanda yang memanfaatkan para kaum priayi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari; pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah pendidikan bagi kaum priayi dalam bentuk berdirinya Sekolah Raja bukan karena Belanda ingin sungguh-sungguh memberikan pendidikan bagi masyarakat Hindia Belanda (pribumi), melainkan untuk mendapatkan tenaga administratif yang terampil dan dapat digaji rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pendidikan dan kurikulum yang diterapkan mengarahkan para priayi ini untuk menjadi pekerja bagi pemerintah Belanda nantinya. Sekolah Raja dianggap sebagai simbiosis yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah Belanda dan para priayi. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak pangreh praja yang menolak untuk masuk dalam pemerintahan Belanda.

Kata kunci: *Sekolah Raja, Pangreh Praja, Priayi, Pemerintah Belanda.*

Abstract

The Dutch government in the Dutch East Indies could not be separated from the role and influence of the priayi in this case the pangreh praja. The pangreh praja or often called the Inlands Bestuur in their government system were deliberately formed for the sake of the government. This research aims to; 1) knowing the background of the establishment of the Hoofdenschool, 2) the development of Hoofdenschool from 1865 to 1900 as a Dutch educational tool that utilized the priayi. The research method used is the historical research method according to Kuntowijoyo which consists of; topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The result of this study is education for the priayi in the form of the establishment of the Hoofdenschool not because the Dutch really wanted to provide education for the people of the Dutch East Indies (natives), but to get skilled and low-paid administrative staff. This can be proven by the education system and curriculum applied to direct these priayi to become workers for the Dutch government later. Hoofdenschool

was considered a mutually beneficial symbiosis for both the Dutch government and the aristocrats. However, in its development many pangreh praja refused to enter the Dutch government.

Keywords: *Hoofdenschool, Pangreh Praja, Priayi, Dutch Government.*

PENDAHULUAN

Pangreh praja dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda memiliki peranan yang sangat penting. Pangreh praja yang bekerja dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda disebut sebagai *Inlands Bestuur* (Kurasawa, 1993: 388-389). Pemerintah Belanda memberikan ruang dan kepercayaan bagi para pangreh praja untuk terlibat banyak dalam administrasi pemerintahan. Umumnya para pangreh praja ini berasal dari golongan priayi (sebutan bagi kaum di masyarakat pribumi yang memiliki status sosial tinggi).

Para pangreh praja ini mendapatkan pendidikan khusus dari pemerintah Belanda. Mereka diwajibkan mengikuti pendidikan dan lulus dari sekolah yang memang sengaja dibentuk untuk mendidik para priayi pilihan ini. Perhatian pemerintah Belanda terhadap keberadaan dari pangreh praja ini sudah mulai ditunjukkan di pertengahan abad XIX. Salah satu sekolah yang dibentuk untuk mendidik para pangreh praja ini adalah Sekolah Raja atau sering disebut *Hoofdenschool* yang berarti sekolah untuk kepala-kepala mengacu pada istilah *Hofd* yang memiliki makna ketua atau kepala, sehingga makna sekolah untuk kepala-kepala karena memang sekolah ini diperuntukkan untuk anak dari kepala-kepala. Muncul pula istilah *Hoofdenschoolen* yang mengacu pada maknanya yaitu sekolah calon pimpinan masyarakat.

Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintahan tertinggi memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda. Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan sejak pemerintahan dibawah Deandels (Nasution, 2001: 10-11). Prinsip-prinsip pendidikan Pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja. Pendidikan tidak diberikan secara menyeluruh kepada semua golongan masyarakat bahkan dasar pendidikan disamakan dengan pendidikan yang ada di Negeri Belanda (Gunawan, 1986: 11). Praktik pendidikan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda tersebut memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan.

Kesempatan pendidikan memang lebih mengutamakan kepada anak-anak bangsawan pribumi, tokoh-tokoh terkemuka, dan pegawai kolonial. Pendidikan tidak diberikan kepada semua kalangan atau kelas sosial di masyarakat. Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu karena Pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa merekalah yang nantinya akan melanjutkan kekuasaan yang diturunkan oleh para orang tua mereka, sehingga sejak kecil sudah mendapat pendidikan Belanda sehingga ketika besar dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Pemerintah Hindia Belanda.

Vlekke (2008: 508) menjelaskan surat keputusan Raja Belanda tertanggal 30 September 1848 Nomor 95 memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal van den Bosch untuk menyediakan biaya f. 25.000,- setahun bagi pendirian sekolah-sekolah pribumi di Pulau Jawa. Keputusan Raja Belanda ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Hindia Belanda sebagai usaha penyelenggaraan pendidikan (Nasution, 2001: 12). Pendirian sekolah pribumi bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri yang disiapkan untuk bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda.

Keseriusan Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan pendidikan di Hindia Belanda juga dikarenakan kebutuhan pegawai yang meningkat seiring dengan meningkatnya usaha-usaha perekonomian yang ada (Djumhur dan Danasuparta, 1959: 128-129). Perekonomian di Hindia Belanda menjadi kekuasaan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria yang diterapkan pada 1870 sebagai Undang-undang pengganti sistem Tanam Paksa. Undang-undang Agraria memberikan kebebasan bagi pengusaha-pengusaha pertanian swasta, sehingga berdampak pada usaha-usaha perekonomian yang semakin pesat. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perubahan di bidang ekonomi yang berpengaruh pada pendidikan. Kondisi politik dan ekonomi yang terjadi menjadi faktor pendorong Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi sesuai dengan kebutuhan.

Raja Belanda mengeluarkan keputusan tanggal 28 September 1892, dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebijakan pendidikan dasar. Sekolah pribumi dibedakan menjadi Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste Klasse School*) dan Sekolah Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) (Gunawan, 1986: 14-15). Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua menjadi sekolah untuk pribumi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sebagai upaya untuk pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Selain Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua yang mulai didirikan Pemerintah Hindia Belanda ini, pemerintah mendirikan sekolah untuk pangreh praja demi kepentingannya. Pertama, pangreh praja akan sangat membantu dalam urusan administratif Belanda yang menghubungkan kaum pribumi pekerja dengan tuan-tuan Belanda. Kedua, pangreh praja berasal dari golongan priayi yang telah memiliki pengaruh dan dihormati oleh rakyat. Ketiga, dengan adanya pangreh praja Belanda mendapatkan tenaga terampil yang dapat digaji rendah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber/*heuristic*, verifikasi, interpretasi dan penulisan/historiografi.

Pemilihan topik tidak boleh bersifat kompilasi terhadap karya yang sudah ada, tetapi memberi sumbangan baru dari hasil penelitiannya. Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 2005: 91).

Tahapan heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber, data, dan informasi yang relevan. Sumber dapat dicari melalui berbagai buku, dokumen atau arsip, artikel, bahan-bahan arkeologis dan bahan lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. Heuristik dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

Kritik sumber sejarah (Verifikasi) adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber (Pranoto, 2010: 35). Kritik sumber terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji secara fisik keaslian atau otentisitas suatu sumber yang dipakai. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis kertas, ukuran kertas, ukuran tulisan, tinta yang digunakan, jenis tulisan dan semua hal yang berkaitan dengan fisik penelitian di luar isi yang ditulis. Kritik internal digunakan untuk menguji kredibilitas atau kesahihan sumber terkait dengan isi yang ditulis.

Interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap data-data yang diperoleh. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta sejarah hingga pada akhirnya akan tersusun suatu fakta yang logis dan bermakna. Interpretasi terdiri dari dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis digunakan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh karena di dalam suatu data terkandung banyak kemungkinan. Sintesis berarti menyatukan, yaitu data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan untuk disatukan atau disimpulkan.

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah yaitu tahap penulisan. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis sangat penting. Peneliti melakukan analisis dan sintesis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya sejarah. Peneliti menyusunnya secara kronologis untuk menyajikan sebuah fakta dalam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya Sekolah Raja

Pendidikan tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan VOC. Permasalahan ini jelas terasa karena pendidikan diawal kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda belum menyentuh masyarakat secara umum. Hal ini didukung oleh kutipan sebagai berikut:

Het onderwijs aan de Indlandsche bevolking van Java is eerst na 1850, onder leiding en met steun der Regeering, in geode banen geleid. Voor dien, in het bijzonder ten tijde van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, werd op Java niet gedacht aan een zich intensief bemoeien met het eigenlijk bestuur of de huishouding der Indlandsche bevolking.

(Pendidikan bagi pribumi yang diberikan untuk penduduk Jawa baru diadakan setelah tahun 1850, di bawah bimbingan dan dukungan dari Pemerintah mulai

menyelenggarakan pendidikan. Sebelumnya, terutama pada saat VOC tidak ada keinginan untuk memberikan pendidikan bagi penduduk Jawa karena setiap daerah memikirkan penduduknya dengan tradisi yang ada) (Deenik, 1929: 5)

Pemerintah Hindia Belanda diawal kekuasaan tidak memperhatikan pendidikan secara serius, mereka lebih banyak fokus pada usaha mempertahankan kekuasaan dan eksploitasi yang menguntungkan dibidang ekonomi. Pendidikan bagi pribumi dirasa tidak perlu diberikan karena tidak memberikan keuntungan terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Pendidikan yang ada hanya untuk anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak Hindia Belanda yang beragama Nasrani (Djumhur, 1959: 118-122). Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sekat dalam masyarakat Hindia Belanda dengan membuat kebijakan untuk golongan tertentu. Pendidikan di Hindia Belanda tidak luput dari kebijakan yang hanya diberikan pada salah satu golongan.

Permasalahan pendidikan terjadi akibat faktor fokus pemerintahan dan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu, namun permasalahan pendidikan juga disebabkan karena faktor finansial. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan pendidikan. Keuangan Pemerintah Hindia Belanda banyak terkuras untuk dana perang.

Pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian besar akibat dana yang dikeluarkan untuk Perang Jawa (1825-1830) dan peperangan antara Belanda dan Belgia (1830-1839). Perang yang dialami Pemerintah Hindia Belanda dalam waktu yang bersamaan membuat kondisi keuangan pemerintah sangat kacau. Kondisi keuangan yang terjadi mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan untuk menanggulangi keadaan keuangan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan keuangan, dengan mengambil langkah politik.

Raja Belanda meninggalkan prinsip-prinsip liberal setelah mengalami kondisi yang kacau akibat perang. Van den Bosch menganjurkan rencana-rencana kepada Raja Belanda. "Rencana-rencana sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi keuangan Pemerintah Hindia Belanda." Van den Bosch memiliki anggapan bahwa rencananya akan berhasil dilaksanakan di Hindia Belanda, dengan memanfaatkan rakyat Hindia Belanda. Rencana van den Bosch yang diterima oleh Raja Belanda ini dinamakan *Cultuurstelsel* atau Tanam Paksa (Ricklefs, 2005: 183-184). Hasil dari tanam paksa diharapkan mampu memberikan keuntungan besar di pasar Eropa apalagi dengan biaya produksi yang rendah di Hindia Belanda.

Sistem Tanam Paksa yang dilaksanakan di Hindia Belanda mengakibatkan kebutuhan pegawai pribumi rendah yang murah untuk menjaga perkebunan pemerintah agar berjalan lancar. Pegawai rendahan yang berasal dari pribumi ini dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional sehingga menjamin keberhasilan sistem ini. Kondisi demikian mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan bagi calon pegawai rendahan.

Sistem Tanam Paksa mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk memperkerjakan pribumi. Pemerintah demi terlaksananya Tanam Paksa sesuai dengan rencana maka pribumi diberikan pendidikan untuk dijadikan pegawai rendahan. Pegawai rendahan untuk Tanam Paksa tentu sangat menguntungkan bagi Pemerintah Hindia Belanda karena digaji rendah.

Tahun 1848 Pemerintah Hindia Belanda masih mengalami kekurangan pegawai khususnya pada bagian administrasi. Kondisi demikian mengakibatkan Gubernur Jenderal diberi kekuasaan mempergunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah f. 25.000 untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi di Pulau Jawa.

Pertama-tama pada tahun 1848 dialokasikan sejumlah anggaran, f. 25000.- per tahun untuk pendirian sekolah. Terutama ditujukan untuk melatih para pemuda yang kemudian akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan (Deenik, 1929: 6).

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah digunakan untuk mencetak calon-calon pegawai. Calon-calon pegawai dipersiapkan untuk memenuhi tenaga kerja murah yang dapat ditempatkan untuk mengawasi Tanam Paksa.

Pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan kesempatan pendidikan bagi pribumi dengan berlakunya Tanam Paksa. Pendidikan bagi pribumi ini semata-mata karena kepentingan Pemerintah Belanda agar mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni dan digaji rendah. Sekolah bertujuan mempersiapkan pegawai-pegawai untuk bekerja sebagai pengawas tanam paksa dan administrasi pemerintahan.

Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan keseriusannya dalam menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi. “Tahun 1867 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu departemen yang disebut *Departement van Onderwijs en Eeredienst*.” Pendidikan mendapatkan perhatian serius dengan dibentuknya departemen yang mengurus pendidikan ini. Pendidikan semakin dirasa penting seiring dengan kebutuhan akan pegawai baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun swasta akibat diberlakukannya Undang-Undang Agraria:

Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1870. Undang-undang Agraria merupakan undang-undang yang sangat penting. Undang-undang Agraria mengakui sistem hak milik pribumi atas tanah; melarang pengalihan hak pribumi atas tanah kepada orang asing; tetapi memperbolehkan penyewaan selama 5-20 tahun; memberikan kebebasan bagi modal swasta untuk menyewa tanah dan tenaga kerja; semua tanah yang tidak merupakan hak milik pribumi dikuasai pemerintah dan ia dapat menyewakannya selama 75 tahun lamanya (Simbolon, 2006: 148).

Undang-undang Agraria membuat Hindia Belanda terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi yang terjadi membuat Hindia Belanda mengalami kemajuan ekonomi. Kondisi perekonomian di Hindia Belanda mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan swasta yang sedang berkembang (Simbolon, 2006: 148).

Tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki syarat mampu menguasai Bahasa Melayu dan berasal dari pembesar pribumi (Simbolon, 2006: 153). Syarat tersebut mutlak karena dengan demikian tenaga kerja yang dibutuhkan berlaku sebagai penyambung antara pemerintah dan pribumi. Kondisi perekonomian yang berkembang pesat berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja, pemenuhan tenaga kerja yang hanya dapat dilakukan dengan mempersiapkan melalui pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi dengan mengeluarkan *Indisch Staatsblad* 1893, no. 25., sebagai berikut:

...pengaturan dasar-dasar baru bagi pendidikan untuk pribumi yang membagi sekolah pribumi menjadi dua bagian. Sekolah Dasar Kelas Satu khusus untuk anak-anak priayi dan kaum terkemuka dan Sekolah Dasar Kelas Dua bagi anak-anak rakyat jelata.

Sekolah Dasar Kelas Satu dan Sekolah Dasar Kelas Dua sebagai sekolah untuk pribumi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda terdapat beberapa hal yang berbeda. Berikut perbandingan kedua sekolah untuk pribumi:

Tabel 1. Perbandingan Sekolah Dasar Kelas Satu dan Sekolah Dasar Kelas Dua.

	Sekolah Dasar Kelas Satu	Sekolah Dasar Kelas Dua
Tujuan	Memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan.	Memenuhi kebutuhan akan pengajaran di kalangan rakyat umum.
Lama belajar	5 tahun	3 tahun
Mata pelajaran	Membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar dan ilmu ukur tanah.	Membaca, menulis, dan berhitung.
Uang sekolah	Minimum f. 1, tiap-tiap bulan.	Tak ditentukan.
Guru-guru	Keluaran <i>Kweekshool</i> (Sekolah Guru).	Tidak ada syarat-syaratnya.
Bahasa pengantar	Bahasa daerah. Bila hal ini tak mungkin, maka pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu.	Sama dengan di Sekolah Dasar Kelas Satu.

Sumber: I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah pendidikan*, hlm.121.

Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua menjadi sekolah pribumi yang dibentuk dengan tujuan memenuhi pegawai-pegawai di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan bagi pribumi, menempatkan pribumi sebagai pegawai di berbagai bidang terutama berkaitan dengan pemerintahan. Kondisi demikian terjadi agar Pemerintah Hindia Belanda tidak

perlu turun langsung kepada masyarakat Hindia Belanda, mereka hanya perlu memberikan perintah kepada para pegawai yang berasal dari pribumi agar tujuannya tercapai.

Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah yang tingkatannya lebih tinggi daripada Sekolah Dasar Kelas Satu dan Sekolah Dasar Kelas Dua. “Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Dokter Jawa yang lebih dahulu didirikan tahun 1851” (Sutherland, 1983: 54). Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Dokter Jawa memiliki perbedaan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua sekolah dasar yang didirikan, tetapi keduanya memiliki persamaan sasaran yaitu pendidikan untuk pribumi (Niel, 2009: 49-50).

Tahun 1865-1872 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Raja sebagai percobaan di Tondano, Sulawesi Utara. “*Eerst in 1878 werd besloten op Java drie scholen te openen, te Bandoeng, Magelang, en Probolinggo...*” (Pertama, pada tahun 1878 ia memutuskan untuk membuka tiga sekolah di Jawa, Bandung, Magelang dan Probolinggo) (Deenik, 1929: 7). Sekolah Raja yang awalnya didirikan di Tondano, akhirnya dibuka resmi di Jawa. Tiga tempat yang digunakan sebagai pendidikan Sekolah Raja di Jawa sebagai usaha pemenuhan jumlah siswa agar mendapatkan lulusan sesuai dengan kebutuhan di seluruh Jawa.

Sekolah Raja didirikan dan dipusatkan di tiga tempat, di Jawa bagian barat yaitu di Bandung, Jawa bagian tengah di Magelang dan Jawa bagian timur di Probolinggo (Arwoko, 1996: 1). Tiga lokasi yang ada ini sebagai bentuk pemusatan dari Sekolah Raja. Siswa-siswa dari Sekolah Raja dikelompokkan sesuai dengan daerah. Siswa Sekolah Raja di Bandung didominasi oleh siswa berasal dari Jawa bagian Barat. Sekolah Raja Magelang didominasi oleh siswa yang berasal dari Jawa Tengah, sedangkan di Probolinggo kebanyakan berasal dari Jawa Timur.

Perkembangan Sekolah Raja

Sekolah Raja didirikan dengan tujuan untuk memenuhi tenaga administrasi Pemerintah Hindia Belanda. Pemusatan pendidikan Sekolah Raja yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memenuhi tenaga kerja administrasi secara merata di seluruh Jawa. Sekolah Raja yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga administrasi sampai ke seluruh Jawa (Gunawan, 1986: 15).

Sekolah Raja tidak untuk seluruh golongan pribumi, melainkan sekolah ini hanya menerima dari anak golongan priayi (Siraishi, 1997: xxiii), sehingga sekolah ini hanya untuk kalangan atas saja. Pemerintah Hindia Belanda tentu tidak memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan bagi golongan priayi karena golongan priayi memiliki pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat.

Hanya menerima siswa-siswa dari putra-putra menak (pejabat) tinggi, seperti: Bupati, Patih, Wedana dan lain-lain. Ini juga awalnya tidak banyak peminatnya, bahkan ada cerita guru-gurunya harus berkeliling ke desa-desa untuk mencari calon siswa. Lihat dalam Moehamad Hasan, “Sekola Menak” (Hasan, 1929: 142-143).

Mohamad Hasan menjelaskan bahwa Sekolah Raja ini hanya menerima anak-anak keturunan Bupati, Patih, Wedana dan para priayi pejabat pemerintah. Awalnya guru-guru dari Sekolah Raja sampai masuk ke desa-desa untuk mencari anak-anak yang mau bersekolah di Sekolah Raja.

Guru-guru dari Sekolah Raja banyak yang berasal dari Negeri Belanda, tetapi ada beberapa guru-guru yang berasal dari Sekolah Pendidikan Guru. Guru-guru yang berasal dari pribumi ini mengajarkan bahasa daerah di Hindia Belanda. Guru-guru dari Negeri Belanda memberikan mata pelajaran kepada siswa-siswa Sekolah Raja menggunakan bahasa Belanda.

Bahasa yang digunakan di Sekolah Raja menjadi sangat penting. Pemerintah Hindia Belanda menginginkan pegawai yang mampu berkomunikasi dengan jajaran Pemerintahan Hindia Belanda dan kepada rakyat secara luas. Bahasa komunikasi demikian sangat penting agar apa yang diinginkan Pemerintah Belanda dapat terlaksana di kalangan masyarakat, lebih tepatnya pegawai diciptakan sebagai penyambung antara pemerintah dan rakyat. Sekolah Raja menggunakan Bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa pengantarnya sesuai dengan kebutuhan.

Bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Raja adalah Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Bahasa Belanda selain digunakan sebagai bahasa pengantar juga diajarkan sebagai mata pelajaran. Bahasa Belanda dan Melayu menjadi bahasa yang penting diajarkan bagi siswa-siswa di Sekolah Raja.

Hoofdenscholen itu tidak memberikan latihan administrasi secara khusus, tetapi mengajarkan mata pelajaran praktek mirip pada sekolah pendidikan guru. Masa belajar diperpanjang dari dua tahun menjadi lima tahun dan ditambahkan mata pelajaran seperti hukum yang dianggap secara khusus berguna bagi masa depan bupati, lantaran kebanyakan para pelajarannya adalah putra-putri bupati dan dianggap saja mereka itu kelak akan menggantikan ayah-ayahnya (Sutherland, 1983: 52).

Pendidikan di Sekolah Raja yang tadinya hanya berlangsung selama dua tahun berubah menjadi lima tahun. Mata pelajaran Hukum di Sekolah Raja menjadi mata pelajaran yang penting bagi para siswa karena siswa-siswa Sekolah Raja nantinya akan menggantikan kedudukan orang tuanya. Pemahaman hukum sangat penting bagi mereka yang nantinya bekerja di pemerintahan.

Kurikulum Sekolah Raja sebagai percobaan di Tondano terdiri atas geodesi, kartografi, menggambar arsitektur, pertanian, peternakan dan tata Susila (Nagazumi, 1989: 24-25). Mata pelajaran telah disusun untuk siswa-siswa di Sekolah Raja menjadi bekal para siswa Sekolah Raja untuk bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda nantinya. Mata pelajaran di Sekolah Raja sebagai berikut: "*Nederlandsche taal, Maleische, Javaansche, Rekenkunde, Meetkunde, Ardjikskunde,*

Geschiedenis, Natuurkennis, Rechtswetenschap, Staatstrecht, Staathuishoudkunde, Landmeten en Waterpassen, dan Lijn- en Kaartteeken (Arwoko, 1996, 1)''.

Mata pelajaran Sekolah Raja khususnya di Magelang diajarkan Bahasa Jawa selain Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Bahasa Jawa menjadi bahasa yang penting karena Bahasa Jawa diperlukan untuk kelancaran komunikasi sebagai bekal bagi siswa-siswa yang didominasi berasal dari Jawa. Pendidikan melalui mata pelajaran yang diberikan seperti pengukuran tanah, penggambaran peta, ilmu hitung, dan geometri benar-benar disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada di Jawa.

Bagaimana tidak ingin daftar melihat begitu majunya sekolah, budi pekerti siswanya baik, pengajarannya bagus, baik pelajarannya, makan tidur sudah diatur, tiap sore diperiksa ke kamar-kamar, takut ada yang tidak rajin belajar, supaya tidak seenaknya saja. Bahkan sampai uang jajan diatur, tidak boleh lebih dari 1,50 f. gulden sebulan. Supaya belajar hemat (Hasan, 1929: 143).

Pendidikan di Sekolah Raja difasilitasi dengan asrama, artinya siswa-siswa makan dan tidur juga sudah di sekolah. Semua aktivitas siswa-siswa di Sekolah Raja sudah diatur, sampai-sampai uang jajan mereka juga diatur untuk melatih supaya siswa-siswa belajar menabung. Siswa-siswa selain belajar mereka juga melakukan segala aktivitas di sekolah.

Sekolah Raja menerapkan pendidikan yang serius untuk mendidik siswa-siswa yang dipersiapkan menjadi pegawai di Pemerintahan Hindia Belanda. Mulai dari guru-guru Belanda, penggunaan bahasa Belanda, mata pelajaran yang diberikan, dan segala aktivitas siswa-siswa yang diatur menunjukkan Pemerintah Hindia Belanda benar-benar untuk mencetak para pangreh praja yang memiliki jiwa dan kebudayaan Belanda.

Pada perkembangannya Sekolah Raja mengalami reorganisasi menjadi OSVIA (*Opleiding School voor Indlandche Ambtanaren*) setelah diterapkannya Politik Etis pada 1900. Reorganisasi yang dilakukan dari Sekolah Raja menjadi OSVIA ini semakin mengukuhkan peran pangreh praja dalam sistem pemerintahan Belanda. Pangreh praja (priayi) banyak yang melihat peluang dalam peran serta mereka dalam pemerintahan. Disisi yang lain, Belanda melihatnya sebagai sebuah keuntungan karena tidaklah diperlukan usaha yang besar untuk turun ke rakyat bawah cukup menggunakan para pangreh praja yang telah diberikan pendidikan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil, pertama latar belakang berdirinya Sekolah Raja sebagai sekolah pangreh praja, pertama karena adanya kebutuhan pegawai rendah yang dapat digaji rendah ketika diterapkannya Tanam Paksa di Hindia Belanda. Tanam Paksa yang dicetuskan oleh van den Bosch sebagai usaha memperbaiki kondisi keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Sistem Tanam Paksa ini mendorong Pemerintah Hindia

Belanda memperkerjakan pribumi sehingga pada tahun 1848 untuk pertama kali diberikan anggaran sebesar f. 25.000 per tahun untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumi di Pulau Jawa.

Kedua, Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1870 memberikan pengaruh terhadap pendidikan bagi pribumi. Undang-Undang Agraria yang ada mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja berpendidikan akibat dari banyaknya perusahaan swasta yang ada di Hindia Belanda. Kebutuhan pegawai ini tidak dapat terpenuhi akibat dari jumlah sekolah yang menghasilkan lulusan sedikit. Lahirnya *Indisch Staatsblad* 1893, no. 25 sebagai awal didirikannya Sekolah Dasar Kelas Satu dan Sekolah Dasar Kelas Dua. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan Sekolah Raja.

Ketiga, Sekolah Raja hanya menerima anak-anak dari golongan priayi yang didirikan di Tondano pada 1872 dan dibuka di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1878. Sistem pengajaran di Sekolah Raja dikhususkan untuk membentuk tenaga administratif Belanda. Kurikulum dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Belanda, seperti mata pelajaran Bahasa Belanda dan Bahasa Daerah (Melayu dan Jawa) yang diberikan sebagai sarana komunikasi antara orang Belanda dengan kaum pribumi. Ilmu ukur, ilmu hitung, dan ilmu alam yang praktis hanya untuk mendukung kegiatan para pangreh praja ini dalam kegiatan administratif. Pemerintah Belanda menginginkan para lulusan pangreh praja yang terampil dan dapat digaji/upah rendah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwoko, 1996. Pendidikan Ke-Pamong-Prajaan di Indonesia sebelum Perang Dunia ke-II. Dalam Tjuk dan Indijati Sukiadi, *OS-MOS: Tonggak-Tonggak Pengabdian dan Perjuangan*, Surabaya: Dharma Padmanaba Press.
- Deenik, A. C. 1929. In Vogelvlucht. Dalam *Gedenkboek: MOSVIA 1879-1929*. Bandung: N.V. Mij Vorkink.
- Djumhur, I. dan Danasuparta. 1959. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.
- Gunawan, Ary H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasan, Moehamad. 1929. Sekola Menak. Dalam A. C Deenik, G. H. H. Zandvoort, R. Sadikin. *Gedenkboek: MOSVIA 1879-1929*, Bandoeng: N.V. Mij Vorkink.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka.
- Nasution,S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ricklefs, M. C. 2005. *A History of Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Simbolon, Parakitri T. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Siraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutherland, Heater. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- van Niel, Robert. 2009. The Emergence of The Modern Indonesian Elite. Dalam Zahara Deliar Noer, *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Vlekke, Bernard H. M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG.